



Available online at **HISTORIA**; Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah
Journal homepage: <https://ejournal.upi.edu/index.php/historia>



RESEARCH ARTICLE

Peran Sunan Gunung Jati dalam Mengembangkan Pusat Peradaban Islam di Cirebon pada Abad 16

Dadan Wildan

Program Studi Pendidikan Sejarah, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia
Correspondence Author dadanwildan2019@gmail.com

To cite this article: : Wildan, D. (2025). Peran Sunan Gunung Jati dalam mengembangkan pusat peradaban Islam di Cirebon pada abad ke-16. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 8(2), 195–204. <https://doi.org/10.17509/historia.v8i2.90876>.

Naskah diterima : 5 September 2025, Naskah direvisi : 7 Oktober 2025, Naskah disetujui : 25 Oktober 2025

Abstract

In the 16th century, Cirebon emerged as a significant center of Islamic civilization in West Java through the strategic role of Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah). As both a political leader and a religious authority, he combined spiritual legitimacy and temporal power to establish an Islamic-based state system that profoundly shaped the social, cultural, and political life of Cirebon. This study aims to examine Sunan Gunung Jati's contributions to the formation of Islamic civilization in Cirebon and the political and cultural transformations that accompanied it. Employing a qualitative approach with a historical-descriptive method, this research draws on classical manuscripts, royal archives, archaeological findings, and modern scholarly works. An interpretative analysis is applied to explore the processes of Islamization, governmental structure, cultural symbolism, and the development of socio-religious institutions under his leadership. The findings indicate that Sunan Gunung Jati successfully founded the Cirebon Sultanate in 1479 as a religio-political system integrating da'wah, governance, and military functions. During his reign, Cirebon experienced significant growth in Islamic architecture, Sufi-inspired arts, and religious traditions, while also emerging as a center for Islamic dissemination and regional trade. The study concludes that his success lay in transforming local Sundanese–Javanese culture into an inclusive and adaptive form of Nusantara Islamic civilization.

Keywords : Cirebon; Islamisasi; Kesultanan; Sunan Gunung Jati; Tasawuf;

Abstrak

Pada abad ke-16, Cirebon berkembang sebagai salah satu pusat penting peradaban Islam di Jawa Barat melalui peran strategis Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah). Sebagai pemimpin politik sekaligus tokoh agama, ia memadukan otoritas spiritual dan kekuasaan duniawi dalam membangun sistem kenegaraan bercorak Islam yang berpengaruh besar terhadap kehidupan sosial, budaya, dan politik masyarakat Cirebon. Penelitian ini bertujuan menjelaskan kontribusi Sunan Gunung Jati dalam pembentukan tamadun Islam di Cirebon serta transformasi politik dan budaya yang menyertainya. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis-deskriptif melalui studi pustaka terhadap naskah klasik, arsip kerajaan, temuan arkeologis, dan karya ilmiah modern. Analisis dilakukan secara interpretatif dengan menelaah proses Islamisasi, struktur pemerintahan, simbolisme budaya, serta perkembangan lembaga sosial-keagamaan pada masa kepemimpinannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sunan Gunung Jati berhasil mendirikan Kesultanan Cirebon pada 1479 dengan struktur religio-politis yang mengintegrasikan dakwah, pemerintahan, dan pertahanan. Di bawah kepemimpinannya, Cirebon mengalami kemajuan dalam arsitektur Islam, seni sufistik, dan tradisi keagamaan, sekaligus berkembang sebagai pusat penyebaran Islam dan simpul perdagangan regional. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilannya terletak pada kemampuan mentransformasikan budaya lokal Sunda–Jawa menjadi peradaban Islam Nusantara yang inklusif dan adaptif.

Kata Kunci: Cirebon; Islamization; Sultanate; Sufism; Sunan Gunung Jati.

PENDAHULUAN

Sejak akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16, kota-kota perdagangan di pesisir utara Jawa sudah menunjukkan aktivitas keagamaan yang dipimpin para wali. Pada masa ini, Islam mulai berkembang tidak hanya sebagai ajaran spiritual, tetapi juga sebagai kekuatan politik. Dengan dukungan Kesultanan Demak, kemudian Pajang dan Mataram, para wali mampu memperluas pengaruh Islam ke berbagai wilayah penting di Jawa dan bahkan ke luar pulau.

Di wilayah Sunda, Syarif Hidayatullah (1448–1568) atau Sunan Gunung Jati dikenal sebagai tokoh utama penyebaran Islam sekaligus pendiri Kesultanan Cirebon pada abad ke-16. Sosoknya dianggap suci dan karismatik; pengaruhnya masih terasa kuat dalam tradisi dan budaya masyarakat, terutama di Cirebon. Kerabat keraton pun menjunjungnya sebagai figur panutan.

Sunan Gunung Jati, atau Syarif Hidayatullah (1448–1568), merupakan salah satu tokoh sentral penyebaran Islam di Jawa Barat sekaligus pendiri Kesultanan Cirebon. Kiprahnya mencakup peran keagamaan, politik, sosial, dan budaya, sehingga menjadikan Cirebon sebagai pusat penting tamadun Islam Nusantara pada abad ke-16.

Melalui peran Sunan Gunung Jati, berlangsung perubahan besar dalam politik, sosial, dan budaya di kota-kota pelabuhan Jawa selama abad ke-16. Saat itu, wilayah pesisir menjadi pusat kekayaan dan pertukaran gagasan. Masjid dan makam dibangun dengan gaya arsitektur khas: batu bata, ornamen hias, dan pilar kayu besar menyerupai pendopo Jawa, yang berfungsi untuk kegiatan ritual Islam. Cirebon pun berkembang menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa bagian barat sekaligus pusat peradaban Islam. Bersama Banten, Cirebon menjelma dari desa nelayan kecil menjadi kota besar yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan kebudayaan Islam, dengan Sunan Gunung Jati sebagai tokoh utamanya.

Setelah wafatnya Syekh Datuk Kahfi, Sunan Gunung Jati melanjutkan kegiatan pendidikan dan dakwah di Pesantren Pasambangan, menjadikannya pusat pembelajaran Islam (Hernawan & Kusdiana, 2020, hlm. 138–139). Pada masa awal dakwahnya di Gunung Sembung dan Babadan, ia memperoleh gelar Syekh Maulana Jati dan selanjutnya memperluas dakwahnya hingga Banten (Hernawan & Kusdiana, 2020, hlm. 125).

Ajaran dakwahnya menekankan pendekatan moderat. Menurut Lubis, moderasi Sunan Gunung Jati tampak dari keharmonisan penggunaan simbol-simbol budaya lokal dan ajaran Islam yang masih dapat dilihat hingga kini (Hernawan & Kusdiana, 2020, hlm. 147). Petuahnyanya banyak menekankan proses mawas diri serta

pencarian jati diri sebagai jalan menuju spiritualitas yang lebih tinggi (Hernawan & Kusdiana, 2020, hlm. 147–148). Masyarakat Cirebon pada masa Sunan Gunung Jati menampilkan simbol-simbol kosmis dan simbol Islam tingkat syariat hingga makrifat, tampak dalam wayang, barang, topeng, dan ronggeng

Kajian tentang peranan Sunan Gunung Jati dalam perkembangan Islam di Cirebon telah dibahas oleh sejumlah peneliti sebelumnya, terutama melalui pendekatan sejarah lokal, kajian kebudayaan, dan studi Islamisasi Jawa. Studi klasik seperti Ambary (1998; 2001) menekankan aspek arkeologis dan sejarah Islam awal, termasuk jejak material berupa masjid, keraton, dan situs pemukiman Islam di Cirebon. Sementara itu, penelitian Reid (1988) dan Shiddique (1977) melihat transformasi budaya pesisir Jawa sebagai bagian dari dinamika ekonomi, sosial, dan jaringan perdagangan regional. Mereka menyoroti keterkaitan perkembangan kota pelabuhan dengan penyebaran Islam dan integrasi budaya lokal dengan pengaruh Islam.

Selain itu, karya Soenardjo (1983; 1996) dan Sulendraningrat (1985) berfokus pada sejarah Cirebon dan narasi keraton yang menempatkan Sunan Gunung Jati sebagai pendiri kesultanan dan tokoh kunci perkembangan politik-budaya Cirebon. Penelitian tersebut banyak mengandalkan babad, arsip keraton, dan tradisi lisan sebagai sumber utama. Kajian lain, seperti oleh Woodward (1999) dan Suseno (1994), menyoroti aspek kekuasaan religius, simbol-simbol spiritual, dan peran para wali dalam pembentukan identitas Islam Jawa.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya masih bersifat parsial: ada yang fokus pada aspek arsitektur, ada yang menekankan struktur politik, atau menyoroti simbolisme budaya dan ritual keraton. Belum banyak penelitian yang menggabungkan seluruh aspek tersebut secara komprehensif untuk melihat Sunan Gunung Jati sebagai aktor multidimensi sebagai pemimpin politik, pemimpin spiritual, pembaru budaya, sekaligus pengembang institusi kenegaraan berbasis Islam. Kajian sebelumnya juga cenderung memisahkan dimensi material (bangunan, situs arkeologis) dan dimensi immaterial (ritus, sufisme, struktur kekuasaan), sehingga gambaran tentang perkembangan tamadun Islam di Cirebon belum sepenuhnya integratif.

Artikel ini memadukan pendekatan historis-deskriptif, interpretasi simbolik, kajian arkeologi, serta analisis struktur pemerintahan Islam dalam satu rangkaian yang utuh. Kajian tidak hanya menjelaskan proses Islamisasi, tetapi juga bagaimana Sunan Gunung Jati melalui keputusan politik, tata kota, arsitektur, seni,

pusaka, dan tradisi membangun sebuah pusat peradaban Islam Nusantara di wilayah Cirebon.

Uraian dalam kajian ini coba menggabungkan analisis politik, sosial-budaya, religius, arkeologis, dan tata kota secara simultan untuk membangun narasi komprehensif tentang tamadun Islam Cirebon. Pendekatan integratif ini memungkinkan penafsiran baru bahwa perkembangan peradaban Islam di Cirebon bukanlah hasil satu faktor tunggal (politik atau dakwah), melainkan sintesis multiaspek yang digerakkan langsung oleh Sunan Gunung Jati. Kajian sebelumnya cenderung menampilkan Sunan Gunung Jati sebagai penyebar Islam atau pendiri kesultanan. Padahal Sunan Gunung jati merupakan arsitek peradaban (*civilizational architect*), yakni tokoh yang merancang struktur kota Islam, sistem pemerintahan religius, jaringan dakwah regional, hingga pembentukan seni-budaya bernuansa sufistiksebuah perspektif yang jarang ditonjolkan dalam kajian sebelumnya.

Penelitian ini menawarkan konsep baru bahwa Cirebon, pada abad ke-16, bukan sekadar kerajaan pesisir, tetapi pusat tamadun Islam Nusantara yang teosentris, kosmopolit, dan adaptif. Perspektif ini memperluas pemahaman bahwa Islamisasi di Jawa Barat tidak hanya bersifat dakwah, melainkan transformasi sistemik yang menghasilkan identitas Islam lokal yang khas.

METODE

Penelitian mengenai Peran Sunan Gunung Jati dalam Membangun Tamadun Islam di Cirebon menggunakan pendekatan kualitatif historis. Pendekatan ini bertujuan merekonstruksi peristiwa masa lampau secara sistematis berdasarkan sumber-sumber yang dapat dipercaya. Metode sejarah yang digunakan meliputi empat tahap pokok: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

Pada tahap heuristik, peneliti mengumpulkan berbagai sumber tentang kehidupan Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) dan perkembangan Kesultanan Cirebon pada abad ke-15 hingga ke-16. Sumber tersebut mencakup naskah klasik seperti Babad Cirebon, arsip kerajaan, catatan kolonial Belanda, serta temuan arkeologi dari Masjid Agung Sang Ciptarasa, Keraton Pakungwati, dan kompleks Astana Gunung Sembung. Literatur modern, antara lain Ambary, Soenardjo, Shiddique, dan Woodward juga digunakan untuk memperkuat analisis mengenai proses Islamisasi dan perubahan budaya di Cirebon. Tahap ini memastikan

tersedianya data yang kaya untuk mengkaji peran Sunan Gunung Jati dari aspek politik, sosial, budaya, hingga keagamaan.

Tahap berikutnya adalah kritik sumber, yang terdiri atas kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal menilai asal-usul dan keaslian sumber dengan memeriksa waktu penulisan, latar belakang penulis, serta konteks sejarahnya. Misalnya, isi Babad Cirebon dibandingkan dengan catatan kolonial dan data arkeologi guna mengurangi unsur mitologis dalam pembahasan tokoh Sunan Gunung Jati. Kritik internal digunakan untuk menilai konsistensi isi dan maksud penulis agar informasi yang dipakai benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini memastikan bahwa data yang digunakan valid dan kredibel.

Setelah itu, tahap interpretasi dilakukan dengan menafsirkan data sejarah menggunakan analisis kontekstual dan komparatif. Peran Sunan Gunung Jati dipahami bukan hanya sebagai penyebar Islam, tetapi juga sebagai pembangun peradaban yang mampu memadukan ajaran Islam dengan budaya Sunda-Jawa. Kerangka teori sosiologi agama serta konsep kekuasaan religius Jawa digunakan untuk menjelaskan bagaimana otoritas spiritual dan politik saling berhubungan. Dari interpretasi ini tampak bahwa proses Islamisasi di Cirebon berkembang secara damai dan adaptif, menciptakan perpaduan harmonis antara ajaran Islam dan tradisi lokal—fondasi penting bagi tamadun Islam di Jawa Barat.

Tahap terakhir, historiografi, menyusun seluruh temuan ke dalam narasi ilmiah yang runtut. Penulisan dimulai dari situasi politik dan sosial Cirebon abad ke-15, kemunculan Sunan Gunung Jati sebagai pemimpin agama dan sultan pertama, hingga terbentuknya institusi-institusi Islam dalam Kesultanan Cirebon serta perluasan pengaruhnya ke Banten, Jayakarta, dan pedalaman Jawa Barat. Pada bagian ini, Sunan Gunung Jati ditempatkan sebagai tokoh kunci dalam pembentukan identitas keislaman masyarakat Sunda sekaligus sosok yang berperan dalam pengembangan struktur sosial, arsitektur kota, dan budaya lokal.

Melalui keempat tahap, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi, penelitian ini berupaya merekonstruksi kiprah Sunan Gunung Jati secara objektif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peradaban Islam di Cirebon tumbuh sebagai hasil perpaduan kreatif antara nilai-nilai Islam dan kearifan lokal, sehingga melahirkan model tamadun Islam Nusantara yang khas dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sunan Gunung Jati; Pemimpin Agama dan Politik

Sunan Gunung Jati tampil sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin politik yang berhasil membangun sistem kekuasaan bercorak religius. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati menempati posisi sentral sebagai pemimpin agama dan politik di Kesultanan Cirebon sejak pengangkatannya sebagai tumenggung pada 1479 dan kemudian sebagai sultan pertama. Suseno (1994, hlm. 31–32) menjelaskan bahwa inti dari konsep kekuasaan religius adalah keyakinan bahwa kekuasaan politik bersifat adiduniawi dan adimanusiawi, berasal dari alam gaib atau aspek Ketuhanan. Karena itu, seorang pemimpin tidak lagi dipandang sebagai manusia biasa, melainkan bagian dari tatanan adiduniawi tersebut. Raja berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan mikrokosmos manusia dengan makrokosmos Tuhan. Kepemimpinannya menandai perubahan mendasar dari struktur pemerintahan bercorak Hindu-Sunda menuju sistem religio-politis Islam yang menyatukan kekuasaan duniawi dan spiritual.

Konsep pemerintahan seperti ini tampak jelas pada masa Sunan Gunung Jati, yang menjadi sultan pertama Cirebon pada 1479. Situasi ini semakin kuat setelah tahun 1482 ketika ia menyatakan kemerdekaan Kesultanan Cirebon dari Pakuan Pajajaran. Bentuk kesultanan tersebut merupakan wujud penyelenggaraan negara yang berlandaskan misi dakwah Islam, sehingga aspek pemerintahan, pengendalian masyarakat, dan pengembangan agama berpadu secara menyatu dan tidak dapat dipisahkan (Panitia Pengumpul Data Hari Jadi Pemda Kabupaten Cirebon, 1988, hlm. 62–63).

Sebagai pemimpin politik, ia memadukan kekuasaan pemerintahan dengan misi dakwah. Konsep kekuasaan yang dianut adalah paham “kekuasaan religius”, yaitu keyakinan bahwa kekuasaan politik bersifat adiduniawi dan merupakan manifestasi kehendak Ilahi. Karena itu, seorang raja tidak lagi dianggap sebagai manusia biasa, tetapi bagian dari tatanan kosmis (Hernawan, & Kusdiana, 2020).

Dalam sistem pemerintahan Kesultanan Cirebon, Sunan Gunung Jati menyandang gelar *senapati ing alaga* (panglima perang) sekaligus sayidin panatagama (pemimpin agama), serta gelar kehormatan panjang *Inggang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purba Panetep Panatagama Awly Allah Qutubiz-Zaman Khalifatur Rasulallah*, menunjukkan kedudukannya sebagai *qutb* atau manusia paripurna dalam kosmologi Islam Jawa

Dalam sistem pemerintahan Kesultanan Cirebon, sultan yang disebut pula *susuhunan* atau *sunan*

memegang kekuasaan tertinggi di wilayahnya. Dalam tradisi Jawa, gelar *senapati ing alaga* sering dilekatkan, mencerminkan bahwa struktur militer tradisional menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, sultan juga dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia, sehingga menyandang gelar *sayidin panatagama* (Lasmiyati, 1995, hlm. 33–34).

Sebagai *senapati ing alaga* dan *sayidin panatagama* yang bergelar *susuhunan* atau *sunan*, Sunan Gunung Jati juga dipandang sebagai *qutb* negara. Karena itu, ia memperoleh gelar lengkap *Inggang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purba Panetep Panata Gama Awly Allah Kutubid Jaman Khalifatur Rasulallah*. Gelar *qutb* atau *Kutubid Jaman* menunjukkan bahwa Sunan Gunung Jati telah mencapai derajat kesempurnaan spiritual tertinggi. Implikasi dari kedudukan ini adalah tanggung jawab untuk menjaga integritas hukum, mengendalikan sumber-sumber kesaktian seperti pusaka dan tempat keramat, serta menjadi penyalur berkah dan inspirasi ilahiah bagi masyarakat (Woodward, 1999, hlm. 266–267).

Sunan Gunung Jati memimpin pemerintahan Cirebon selama kurang lebih 89 tahun, dari 1479 hingga 1568 (Sunardjo, 1983, hlm. 3). Pada masa kepemimpinannya, selain membangun infrastruktur politik dan sosial, Kesultanan Cirebon juga terlibat dalam sejumlah konflik penting melawan para adipati bawahan Pakuan Pajajaran. Dalam upaya memperluas wilayah, Cirebon turut berperang dalam tiga pertempuran besar (Soenardjo, 1996, hlm. 34–35). Pertempuran pertama berlangsung pada 1526, yaitu operasi gabungan Cirebon dan Demak di bawah pimpinan Fatahillah untuk merebut Sunda Kalapa dari Portugis. Serangan ini berhasil dimenangkan oleh pasukan gabungan tersebut.

Usai kemenangan di Sunda Kalapa, sebagian pasukan Demak singgah di Cirebon sebelum kembali ke Demak. Sunan Gunung Jati meminta mereka tinggal lebih lama karena dikhawatirkan Cirebon akan diserang oleh Prabu Cakraningrat dari Rajagaluh melalui Arya Kiban. Atas pertimbangan strategis, pasukan gabungan Cirebon–Demak kemudian menyerang Rajagaluh terlebih dahulu pada 1529. Pertempuran terjadi di Pegunungan Kromong, yang menjadi basis militer Rajagaluh. Dalam pertempuran itu, Arya Kiban dan banyak pasukannya tewas, sementara sisanya melarikan diri. Pertempuran ketiga terjadi di wilayah Talaga, sebuah kerajaan kecil di selatan Majalengka. Konflik ini diawali serangan Arya Salingsingan terhadap Sunan Gunung Jati karena ia menduga Cirebon akan menyerang Talaga seperti halnya Rajagaluh.

Masa penguatan Kesultanan Cirebon berlanjut dengan periode konsolidasi yang berfokus pada

pembangunan mental dan spiritual masyarakat. Keberhasilan pemerintahan dan politik pada fase ini tampak dalam beberapa capaian berikut.

Pertama, hingga tahun 1530 wilayah kekuasaan Cirebon telah mencakup sekitar setengah dari kawasan yang kini menjadi Provinsi Jawa Barat, termasuk wilayah Banten. Jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 600.000 jiwa, sebagian besar belum memeluk Islam. Selain itu, seluruh pelabuhan penting di pesisir utara Jawa Barat berhasil berada di bawah kendali Cirebon. Kedua, pembangunan masjid jami di ibu kota, masjid-masjid di berbagai daerah taklukan, serta langgar di kawasan pelabuhan telah rampung.

Ketiga, Keraton Pakungwati—kediaman resmi Sunan Gunung Jati—telah disesuaikan dengan fungsi dan kedudukannya sebagai pusat pemerintahan Islam. Keempat, berbagai fasilitas pendukung pemerintahan seperti tembok keliling keraton, beberapa gerbang, pangkalan perahu kerajaan, pos keamanan, istal kuda, bangunan untuk kereta kerajaan, pedati angkut barang, sitiinggil, gedung peradilan (*pancaniti*), dan alun-alun telah selesai dibangun serta dipercantik.

Kelima, tembok keliling ibu kota yang meliputi area sekitar 50 hektar berikut pintu-pintu gerbang dan pos-pos jagabaya telah selesai dibangun dalam kurun waktu sekitar tiga tahun. Keenam, jalan utama menuju pelabuhan Muarajati, jalan-jalan ibu kota, dan jaringan jalan yang menghubungkan pusat pemerintahan dengan wilayah bawahannya telah diselesaikan. Ketujuh, kekuatan pasukan jagabaya meningkat pesat, organisasi militernya telah tertata, dan komando tertinggi dipegang oleh seorang tumenggung yang disebut tumenggung jagabaya. Kedelapan, penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah bawahan diatur melalui sistem birokrasi yang rapi, termasuk penyeragaman gelar jabatan yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati (Sunardjo, 1996, hlm. 38–40).

Selain melakukan penataan administratif pemerintahan, Sunan Gunung Jati juga memperluas wilayah kekuasaan dan penyebaran Islam dengan menaikkan status Banten dari sebuah keadipatian menjadi Kesultanan Banten yang mandiri pada tahun 1552. Sultan pertama Banten adalah Pangeran Adipati Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati dari Dewi Kawunganten yang berasal dari Banten. Daerah kekuasaannya mencakup Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, hingga Sunda Kalapa. Pendirian Kesultanan Banten sebagai wilayah otonom merupakan langkah strategis Sunan Gunung Jati untuk mempersempit ruang gerak Kerajaan Pakuan Pajajaran sekaligus memperkuat sistem pengawasan terhadap wilayah kekuasaannya yang semakin luas (Sunardjo, 1996, hlm. 40–42).

Menurut Sunardjo (1983, hlm. 61), strategi politik yang digunakan Sunan Gunung Jati dalam membangun Kesultanan Cirebon adalah menerapkan asas desentralisasi, mengikuti pola pemerintahan kerajaan-kerajaan pesisir. Dalam sistem ini, pelabuhan memiliki peran utama sebagai pusat ekonomi dan aktivitas politik, sedangkan wilayah pedalaman berfungsi sebagai penopang vital. Strategi desentralisasi tersebut diwujudkan melalui intensifikasi dakwah Islam di seluruh daerah bawahan di tanah Sunda, disertai penguatan sektor perdagangan yang terhubung dengan berbagai negeri seperti Campa, Malaka, India, dan Arab. Untuk menjalankan program pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan didukung oleh ekonomi maritim, Sunan Gunung Jati menempatkan pejabat-pejabat dari kalangan kerabat dan ulama sebagai pengelola pemerintahan.

Kombinasi peran sebagai wali, pendakwah, raja, dan panglima menjadikan Sunan Gunung Jati figur yang mampu mentransformasikan masyarakat Sunda dari budaya Hindu-Sunda menuju peradaban Islam yang kosmopolit. Ia berhasil menjadikan Cirebon pusat pemerintahan Islam, pusat perdagangan, dan pusat penyebaran Islam ke barat (Banten, Jayakarta) dan selatan (Kuningan, Majalengka).

Peran Sunan Gunung Jati dalam Mengembangkan Pusat Peradaban Islam di Cirebon Pada Abad 16

Peran Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah) dalam membentuk Cirebon sebagai pusat peradaban Islam pada abad ke-16 merupakan salah satu kontribusi terbesar dalam sejarah Islam di Tatar Sunda. Perannya mencakup aspek keagamaan, politik, sosial, budaya, dan transmisi ilmu, yang kesemuanya berkontribusi pada berkembangnya Cirebon sebagai kota bandar Islam yang kosmopolit. Pada awalnya, Cirebon adalah sebuah pedukuhan yang berkembang menjadi negeri kemudian menjadi sebuah kerajaan. Menurut Purwaka Caruban Nagari, wilayah Cirebon pada mulanya dikenal sebagai Dukuh Caruban. Pemukiman ini didirikan oleh putra mahkota Kerajaan Pajajaran, yaitu Pangeran Cakrabuana atau Raden Walangsungsang, dengan bantuan adiknya, Nyai Lara Santang, serta istrinya, Nyai Indang Geulis. Pendirian dukuh tersebut dilakukan atas perintah gurunya, Syekh Nurul Jati atau Syekh Datuk Kahfi (Hardhi, 2014).

Pada 1445 M, Pangeran Cakrabuana mulai membuka wilayah baru di daerah Tegal Alang-Alang. Pemukiman yang dirintisnya kemudian dikenal sebagai Lemah Wungkuk. Daerah ini sebelumnya telah dihuni seorang nelayan bernama Ki Gedheng Alang-Alang atau Ki Danusela, yang kelak menjadi Kuwu Cerbon pertama.

Seiring waktu, pedukuhan tersebut berkembang pesat, banyak didatangi para pedagang, dan akhirnya berubah nama menjadi Cirebon. Syekh Datuk Kahfi memberi gelar Ki Somadullah kepada Pangeran Cakrabuana. Dengan nama tersebut, ia menggantikan Ki Gedheng Alang-Alang sebagai Kuwu Cerbon kedua dan mulai membangun Keraton Pakungwati dengan gelar Sri Mangana.

Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Nyai Pakung Wati, yang dibarengi penyerahan kekuasaan dari Pangeran Cakrabuana kepada Sunan Gunung Jati, menandai bahwa sekitar tahun 1479, Cirebon telah berdiri sebagai negara merdeka. Langkah penting berikutnya dilakukan Sunan Gunung Jati pada tahun 1483, yaitu menghentikan pengiriman bulubekti atau upeti berupa garam dan terasi kepada Kerajaan Pakuan Pajajaran. Keputusan ini mendapat restu Pangeran Cakrabuana serta dukungan para Walisongo. Dengan dihentikannya upeti tersebut, Kesultanan Cirebon secara resmi memutuskan ketergantungan politiknya dari Pajajaran yang beragama Hindu dan tampil sebagai kerajaan Islam yang merdeka di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati (Hardhi, 2014).

Pada tahap awal dakwahnya, Sunan Gunung Jati melanjutkan pesantren Pasambangan yang sebelumnya dipimpin Syekh Datuk Kahfi. Ia mengembangkan lembaga pendidikan Islam dengan mengajarkan ajaran agama baik di Gunung Sembung, Pasambangan, maupun di Dukuh Babadan, sebelum akhirnya memperluas dakwah hingga ke Banten. Peran awal ini penting karena pendidikan dan pesantren menjadi basis penyebaran Islam di Cirebon dan sekitarnya.

Kedudukan Sunan Gunung Jati semakin menguat ketika ia diangkat menjadi penguasa Cirebon menggantikan Pangeran Cakrabuana. Sunan Gunung Jati memperoleh gelar Sang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purba Panetep Panata Agama, serta gelar Wali Kutub, yang menunjukkan bahwa ia berperan ganda sebagai pemimpin religi dan pemimpin pemerintahan. Gelar ini merepresentasikan legitimasi spiritual sekaligus politik yang memperkuat otoritasnya sebagai pemimpin Islam di Tanah Sunda.

Sunan Gunung Jati juga memainkan peran strategis dalam jaringan politik Islam Nusantara. Ia memperkuat hubungan dengan Demak, menempatkan Maulana Hasanuddin di Banten, dan melalui aliansi dengan Demak serta dukungan Fatahillah, berhasil mematahkan kekuatan Portugis-Pajajaran di Sunda Kalapa sehingga memperkuat dominasi Islam di wilayah barat Jawa

Berger dan Luckmann, sebagaimana dijelaskan oleh Shiddique (1977, hlm. 6), memandang bahwa Kesultanan Cirebon memiliki tiga aspek utama: aspek religius, aspek

ekonomi dan politik, serta fungsi kesultanan sebagai religious institution atau lembaga agama. Shiddique (1977, hlm. 18) menjelaskan bahwa ketiga aspek tersebut membentuk tiga lingkaran konsentrik dengan keraton sebagai pusatnya, yakni nagarageung sebagai inti wilayah, mancanegara sebagai kawasan sekutu, dan pasisir sebagai bagian dari wilayah provinsi.

Menurut Sunardjo (1983, hlm. 77–78), hanya dalam kurun waktu sekitar tiga tahun setelah Syarif Hidayatullah diangkat sebagai tumenggung, Cirebon mengalami perkembangan pesat yang terlihat melalui beberapa indikator berikut. Pertama, prasarana utama kerajaan pesisir telah terpenuhi, ditandai dengan berdirinya keraton sebagai kediaman resmi susuhunan dan pusat pemerintahan yang berlokasi dekat muara Kali Kriyan; Masjid Agung sebagai pusat ibadah sekaligus tempat penyusunan program dakwah Islam; pelabuhan utama Muarajati sebagai pusat perekonomian; jaringan jalan raya yang menghubungkan pusat pemerintahan dengan pusat perdagangan dan pendidikan agama; serta pasar di Pasambangan dan kawasan pelabuhan sebagai pusat kegiatan ekonomi.

Kedua, wilayah pedalaman (*hinterland*) telah berada di bawah kontrol Cirebon, berfungsi sebagai pemasok bahan pangan dan daerah penghasil garam—komoditas penting bagi pendapatan kerajaan pesisir. Ketiga, telah terbentuk kekuatan militer berupa pasukan atau laskar yang dipimpin para panglima (tumenggung) yang memiliki loyalitas tinggi. Keempat, terdapat sejumlah penasihat pemerintahan dan pemimpin wilayah (*gedeng*) yang menunjukkan loyalitas kuat kepada pemerintahan. Kelima, hubungan diplomatik antara Cirebon dan Demak terjalin sangat erat, memungkinkan kerja sama dalam hal pertahanan kapan pun diperlukan. Keenam, Cirebon memperoleh dukungan penuh dari para wali di seluruh Pulau Jawa. Ketujuh, tidak ada indikasi munculnya ancaman dari Kerajaan Pakuan Pajajaran pada masa tersebut.

Sebagai seorang pemimpin agama, Sunan Gunung Jati berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam melalui dakwah, pendidikan keagamaan, dan keteladanan moral. Di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, Cirebon berkembang menjadi salah satu kesultanan awal sekaligus pusat penyebaran Islam yang penting di Jawa. Pada masa ini, Cirebon tumbuh menjadi pusat agama, kekuatan politik, serta ruang berkembangnya kehidupan sosial dan budaya. Sebagai anggota Wali Songo, Sunan Gunung Jati menjalankan fungsi dakwah secara intensif dan terorganisasi. Ia menetapkan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan penyebaran Islam, diawali dengan pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa pada 1480 M yang dibantu oleh Sunan Bonang dan

Sunan Kalijaga. Masjid-masjid jami kemudian dibangun di seluruh wilayah bawahan Cirebon untuk memperkuat sistem keagamaan. Sunan Gunung Jati juga melakukan dakwah langsung ke berbagai wilayah pedalaman seperti Luragung, Kuningan, Rajagaluh, Talaga, Ukur, hingga Cianjur, terutama sejak 1528 M.

Berbagai simbol sosial dan budaya yang muncul pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati masih dapat ditemukan hingga sekarang. Siddique (1977, hlm. 79–82) menjelaskan bahwa simbol-simbol tersebut terdiri dari simbol kosmis dan simbol yang bersumber dari ajaran Islam. Simbol kosmis diwujudkan dalam bentuk payung sutra kuning berkepala naga, melambangkan perlindungan raja terhadap rakyat. Sementara itu, simbol-simbol keislaman dibagi ke dalam empat tingkatan spiritual: syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat.

Tingkatan syariat disimbolkan melalui wayang, yang menggambarkan manusia sebagai hamba, sedangkan dalang sebagai representasi Allah. Tarekat dilambangkan oleh barong, hakikat oleh topeng, dan makrifat oleh ronggeng. Keempatnya merupakan bentuk kesenian tradisional Jawa-Cirebon yang tetap hidup sampai sekarang.

Simbol-simbol tersebut sering hadir dalam berbagai ritual selamatan (*sédékahan*) dan perayaan keislaman yang diwarisi dari tradisi Walisongo, termasuk Sunan Gunung Jati. Salah satu upacara terbesar adalah *sékaten*, yang diselenggarakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Saw. Upacara ini digelar di alun-alun ibu kota kesultanan dan dimulai tujuh hari menjelang 12 Rabi'ul Awwal. Puncak perayaan ditandai dengan *garébêg*, yaitu pembacaan sirah Nabawiyah (*siratur nabiyy*) serta pembagian sedekah sultan di Masjid Agung. Acara tersebut dihadiri oleh sultan beserta para pejabat dan menjadi momentum bagi para adipati, bupati, dan penguasa wilayah untuk menunjukkan penghormatan dan kesetiaan mereka (Saksono, 1995, hlm. 150–151).

Menurut Sulendraningrat (1985, hlm. 83–84), perayaan maulid Nabi Muhammad Saw. dalam skala besar di Keraton Cirebon mulai diselenggarakan sejak Sunan Gunung Jati diangkat sebagai wali kutub pada 1479. Masyarakat Cirebon hingga kini mengenal tradisi ini sebagai iring-iringan panjang jimat.

Perayaan-perayaan keagamaan Islam yang dilakukan oleh keluarga keraton menunjukkan bahwa Sunan Gunung Jati dan keturunannya menempati posisi sosial yang penting. Mengutip taksonomi santri-abangan-priyayi dari Geertz, Siddique (1977, hlm. 91) mengelompokkan Sunan Gunung Jati dan garis keturunannya ke dalam golongan santri. Klasifikasi ini memperkuat legitimasi peran, fungsi, dan kedudukan

Sunan Gunung Jati sebagai penatagama atau pemimpin keagamaan.

Pada abad ke-16, terjadi perubahan budaya yang signifikan di kota-kota pelabuhan Jawa, yang saat itu menjadi pusat kemakmuran dan pertukaran gagasan. Reid (1988, hlm. 175) mencatat bahwa masjid dan makam suci dibangun dengan perpaduan batu bata dan ukiran dekoratif, dilengkapi pilar kayu besar yang meniru bentuk pendopo Jawa sebagai penyesuaian terhadap kebutuhan ritual Islam. Dalam konteks tersebut, Cirebon muncul sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa bagian barat sekaligus pusat penting peradaban Islam, dengan sejumlah ciri khas yang menonjol.

Pertama, kehidupan kota berkembang dengan corak Islam yang kuat, ditandai oleh struktur masyarakat dan hierarki sosial yang kompleks. Kedua, arsitektur sakral dan profan mengalami kemajuan—terlihat dari pembangunan Masjid Agung Cirebon (Sang Ciptarasa), empat keraton (Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan, dan Kaprabonan), serta bangunan sitiinggil yang memadukan unsur lokal termasuk elemen pra-Islam. Ketiga, seni lukis kaca dan seni pahat berkembang pesat, menghasilkan karya kaligrafi berciri khas Cirebon dengan unsur antropomorfis yang jarang ditemukan dalam seni Islam pada umumnya.

Keempat, berbagai jenis seni seperti tari, batik, musik, dan beragam seni pertunjukan tradisional berkembang dengan nuansa Islam, termasuk ragam hias awan khas Cirebon. Kelima, tradisi intelektual Islam meningkat melalui penulisan naskah-naskah keagamaan dan karya pemikiran yang kini tersimpan di keraton-keraton Cirebon serta beberapa tempat di Jawa Barat, seperti Museum Prabu Geusan Ulun Sumedang dan Museum Cigugur Kuningan—yang sebagian besar masih menunggu kajian mendalam.

Keenam, berkembangnya tarekat Syattariyah melahirkan karya sastra sufistik berbentuk serat suluk yang memuat ajaran wujudiyah atau martabat tujuh. Tradisi ini kemudian memberi pengaruh luas pada tradisi sastra tulis di Surakarta. Ketujuh, pendidikan Islam berbasis pesantren tumbuh di berbagai wilayah sekitar Cirebon seperti Indramayu, Karawang, Majalengka, dan Kuningan (Ambary, 1998, hlm. 109–110).

Peradaban Islam yang dibangun oleh Sunan Gunung Jati memberikan kontribusi besar dalam membentuk cara pandang dunia yang bersifat teosentrik—berpusat pada Tuhan—berbeda dari peradaban Barat yang lebih bersifat antroposentrik, yakni berpusat pada manusia. Dalam tradisi Cirebon disebutkan bahwa tamadun Islam di Cirebon dan Banten telah mengubah dua desa nelayan kecil menjadi kota-kota besar, dengan Sunan Gunung Jati sebagai tokoh utamanya.

Proses Islamisasi serta perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di pesisir utara Jawa dapat diketahui bukan hanya dari naskah sejarah seperti babad, cerita tradisi, dan catatan asing, tetapi juga melalui peninggalan arkeologis di bekas pusat kota dan pelabuhan masyarakat muslim (Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional, 1976, hlm. 3).

Islamisasi di Cirebon dan tanah Sunda oleh Sunan Gunung Jati meninggalkan berbagai jejak purbakala yang menjadi bukti aktivitas dakwah dan pemerintahan beliau. Beberapa peninggalan penting yang masih dapat dilihat hingga kini meliputi sisa-sisa Keraton Dalem Agung Pakungwati, area alun-alun, Masjid Agung Sang Ciptarasa, Tajug Jalagrahan, pusaka-pusaka kerajaan termasuk kereta kencana (kini tersimpan di Museum Keraton Kasepuhan), serta kompleks makam Sunan Gunung Jati di Astana Gunung Sembung.

Tata ruang ibu kota Kesultanan Cirebon—yang masih dapat diamati sampai sekarang—menjadi prototipe awal dari pola kota Islam di Nusantara. Elemen utamanya terdiri atas alun-alun di pusat kota, keraton di sebelah selatan, masjid di sebelah barat, serta pasar di bagian utara atau timur alun-alun. Area ini juga dikelilingi oleh pemukiman bangsawan dan pejabat kerajaan, mengikuti model kota kerajaan bercorak Islam (Aspek Sejarah dan Lingkungan Budaya, 1995, hlm. 15).

Pola kota tersebut ditata dengan alun-alun berbentuk persegi empat di tengah; keraton Pakungwati di sisi selatan; masjid kerajaan di sisi barat; dan pasar di sisi utara. Pola ini kemudian diadopsi oleh kota-kota bawahan Cirebon, dan hingga kini masih dapat ditemukan pada pusat-pusat pemerintahan di banyak wilayah Jawa—baik ibu kota kabupaten maupun kota kecamatan (Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Unpad, 1991, hlm. 54–55).

Keraton Kasepuhan beserta elemen fisiknya—Masjid Agung di sisi barat alun-alun, alun-alun itu sendiri, dan pasar di timur laut—masih menunjukkan inti kota lama. Bagian tertua Keraton Kasepuhan adalah puing Dalem Agung Pakungwati yang pada masa Sunan Gunung Jati berfungsi sebagai istana. Elemen penting lain yang masih tersisa meliputi sitiinggil di bagian depan dan tembok timur yang dikenal sebagai kuta kosod (Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional, 1976, hlm. 8).

Sitiinggil dibangun pada 1347 Saka atau 1425 M dan terdiri dari sejumlah bangunan tanpa dinding. Di antaranya terdapat Pëndawa Lima, bangunan bertiang lima yang melambangkan lima rukun Islam dan menjadi tempat berkumpul para pengawal sultan. Ada pula Sêmar Kênandu, bangunan bertiang dua yang melambangkan dua kalimat syahadat dan menjadi tempat duduk para penasihat sultan. Di sampingnya

terletak Malang Sêmiring, tempat sultan duduk untuk menyaksikan kegiatan di alun-alun atau memimpin sidang terhadap terdakwa yang dijatuhi hukuman mati. Selain itu, terdapat Mande Karèsmen, yang dipakai untuk menampilkan gamelan sêkaten setiap 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah, serta Mande Pêngiring, ruangan bagi para pengiring sultan atau tempat hakim memeriksa perkara hukuman mati (Aspek Sejarah dan Lingkungan Budaya, 1995, hlm. 38–39).

Kompleks keraton dihubungkan dengan dunia luar melalui jembatan krêtêg pêngrawit. Jembatan ini bermakna bahwa siapa pun yang masuk ke wilayah keraton harus memiliki niat baik, sebagaimana arti kata pêngrawit yang berarti lembut dan penuh perasaan. Jembatan tersebut melintasi saluran air bernama sêpadu, yang menjadi batas antara masyarakat umum dan penghuni keraton. Bangunan terakhir yang menandai peralihan dari ruang publik menuju kawasan keraton adalah Panca Ratna dan Panca Niti, yang berada di sisi kanan dan kiri jalan menuju jembatan serta terletak di bagian depan alun-alun (Aspek Sejarah dan Lingkungan Budaya, 1995, hlm. 40).

Di depan keraton terdapat alun-alun yang merupakan ruang publik terluar. Sunan Gunung Jati menamainya Sangkala Buwana, yang berfungsi untuk rapat besar, latihan militer, serta tempat perayaan dan upacara keagamaan. Di sisi barat alun-alun berdiri Masjid Agung Sang Ciptarasa, yang berperan sebagai pusat ibadah sekaligus tempat dakwah Islam. Bagian tertua masjid adalah inti bangunan yang masih mempertahankan dinding berhias motif bunga teratai. Di dalamnya terdapat empat tiang utama (sokoguru), salah satunya adalah sokotatal yang terbuat dari potongan-potongan kayu. Masjid ini tidak memiliki mêmolo di bagian puncaknya dan mempunyai sembilan pintu gerbang sebagai simbol Walisanga (Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional, 1976; Behrend, 1984).

Pada bagian mihrab terdapat ukiran bunga teratai yang dipercaya dibuat oleh Sunan Gunung Jati sebagai simbol hayyun ila ruhin (hidup tanpa ruh). Di depan mihrab terdapat tiga ubin bertanda khusus yang melambangkan tiga konsep ajaran Islam: iman, Islam, dan ihsan. Selain Masjid Sang Ciptarasa, Masjid Jalagrahan adalah salah satu masjid tertua yang dibangun pada masa Pangeran Cakrabuana (Walangsungsang), sebelum berdirinya Masjid Agung. Masjid yang awalnya berbentuk tajug ini masih berdiri hingga kini di sebelah timur Keraton Pakungwati, meskipun hanya sedikit bagian kuno yang tersisa, seperti mihrab dari kayu jati (Aspek Sejarah dan Lingkungan Budaya, 1995, hlm. 38–39).

Berbagai pusaka peninggalan Sunan Gunung Jati yang kini disimpan di Museum Keraton Kasepuhan menjadi bagian penting dari warisan kepurbakalaan masa hidup beliau. Benda-benda tersebut, yang juga terkait dengan kisah-kisah legenda Sunan Gunung Jati, meliputi golok cabang, pusaka utama Keraton Cirebon, gamelan dègung, gamelan sèkaten, bende (gong kecil), serta berbagai benda keramik.

Menurut naskah tradisi Cirebon, golok cabang merupakan milik Pangeran Walangsungang atau Cakrabuana yang pertama kali digunakan untuk membuka hutan ketika merintis pembangunan wilayah Cirebon. Golok ini berbentuk congak ngondol bermahkota, melambangkan ketajaman dua arah— simbol seorang pemimpin yang juga berperan sebagai mubalig, memberi petunjuk bagi masyarakat tentang kehidupan dunia dan akhirat. Pada bagian kepala golok terdapat empat bulatan kecil, satu tanda persegi, dan satu bulatan besar. Lima bulatan kecil melambangkan rukun Islam, sedangkan tanda persegi menggambarkan empat dasar dalam ajaran Islam: syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat (Aspek Sejarah dan Lingkungan Budaya, 1995, hlm. 47–48).

Gamelan dègung merupakan hadiah dari Ki Gede Kawung-caang dari Banten pada 1426 dan merupakan duplikasi pusaka Pajajaran. Adapun gamelan sèkaten diberikan oleh Sultan Trenggono sebagai hadiah pernikahan Ratu Mas Nyawa dari Demak dengan Pangeran Bratakelana pada 1495. Pada masa Sunan Gunung Jati, gamelan sèkaten ini dipakai sebagai sarana dakwah untuk menarik masyarakat memeluk Islam. Sementara itu, bende atau gong kecil digunakan dalam upacara pelantikan Syarif Hidayatullah sebagai sultan pada 1479.

Tabel 1. Ketersediaan sumber tradisi lisan dan sejarah lisan di Indonesia

Provinsi	Tradisi Lisan	Sejarah Lisan
Jawa Barat	Ada	Ada
Sumatera Selatan	Ada	Tidak Ada
Kalimantar Timur	Ada	Ada
Papua	Ada	Tidak Ada

Sumber: Data Penulis

Makam Sunan Gunung Jati menjadi pusat spiritual yang penting, yang bukan hanya berfungsi sebagai situs sejarah, tetapi juga sebagai media ziarah bagi umat Islam. Ziarah tersebut mencerminkan penghormatan mendalam terhadap figur religius yang dianggap memiliki kedekatan spiritual dengan Tuhan. Ritual

seperti selamatan, dzikir, tabur bunga, dan ziarah tujuh sumur menjadi bagian dari warisan tradisi yang berakar pada kepemimpinan Sunan Gunung Jati (Musrifah, 2018).

KESIMPULAN

Peran Sunan Gunung Jati sangat menentukan dalam membangun institusi kerajaan Islam di Cirebon dan memperluas pengaruh Islam di Jawa Barat. Di bawah kepemimpinannya, Cirebon tidak hanya berkembang menjadi bandar perdagangan yang ramai dan berhubungan dengan pusat-pusat kekuasaan internasional seperti Cina, tetapi juga memperoleh kedudukan terhormat di antara kerajaan-kerajaan Islam lain, terutama Banten dan Mataram.

Dalam proses Islamisasi abad ke-16, Sunan Gunung Jati berhasil menjadikan Cirebon pusat penting penyebaran Islam di Jawa Barat dengan beberapa capaian utama. Pertama, strategi politik dan dakwahnya terbukti efektif melalui penempatan Maulana Hasanuddin di Banten dan keberhasilan mematahkan aliansi Portugis–Pakuan Pajajaran melalui peran Fatahillah di Sunda Kalapa, yang kemudian memperkuat aliansi Demak–Cirebon–Jayakarta dalam menaklukkan Pajajaran. Kedua, jaringan kekuatan Islam di Jawa Timur—yang didukung para wali seperti Sunan Kalijaga—memperkuat posisi Cirebon, terlebih karena hubungan kekerabatan Sunan Gunung Jati dengan Kesultanan Demak melalui pernikahan dengan Nyai Tepasari.

Ambary (2001) menegaskan bahwa melalui peran sebagai pendiri kota, pemimpin kerajaan, dan wali, Sunan Gunung Jati menampilkan sejumlah fakta sejarah penting. Pertama, Islam berkembang secara bertahap dari sebuah permukiman kecil hingga menjadi pusat tamadun Islam di Jawa Barat. Kedua, perkembangan ini berjalan damai karena karisma para wali dan hubungan genealogis yang kuat antara penguasa baru dan penguasa lama. Ketiga, Cirebon tumbuh sebagai masyarakat kosmopolit dengan budaya Islam yang berpadu dengan tradisi pra-Islam, tercermin pada arsitektur, seni, dan sistem sosial. Keempat, munculnya cabang-cabang seni Islam seperti kaligrafi, lukisan kaca, topeng, ragam hias awan, dan suluk menunjukkan kreativitas lokal dalam mengolah tradisi Islam. Kelima, pengaruh Cina yang disebut dalam tradisi lokal terlihat dalam unsur seni bangunan dan kerajinan Cirebon. Keenam, dari posisi geografis yang strategis, Cirebon menjadi simpul penting penyebaran Islam, baik ke barat (Sumedang, Jayakarta, Banten) maupun ke selatan (Kuningan, Majalengka), serta terhubung erat dengan jaringan Islam dari timur seperti Demak, Mataram, Gresik, dan Giri.

Secara keseluruhan, kepemimpinan Sunan Gunung Jati menempatkan Cirebon sebagai pusat politik, budaya, dan spiritual yang memegang peranan sentral dalam proses Islamisasi di Jawa Barat dan wilayah sekitarnya.

REFERENSI

- Ambary, H. M. (1998). *Menemukan peradaban: Jejak arkeologis dan historis Islam Indonesia*. Logos Wacana Ilmu.
- Ambary, H. M. (2001). *Sunan Gunung Jati dan perkembangan Islam di Jawa Barat*. Puslit Arkenas.
- Aspek Sejarah dan Lingkungan Budaya. (1995). *Cirebon: Aspek sejarah dan lingkungan budaya*. Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.
- Behrend, T. E. (1984). *Katalog induk naskah-naskah Nusantara, Jilid 1: Museum Sonobudoyo*. Djambatan.
- Basyari, H. (1989). *Sekitar Komplek Sunan Gunung Jati dan Sekilas Riwayatnya*. Zulfana.
- Hardhi, T. R. (2014). *Dakwah Sunan Gunung Jati Dalam Proses Islamisasi di Kesultanan Cirebon Tahun 1479-1568*. Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, 1-9.
- Hernawan, W., & Kusdiana, A. (2020). *Biografi Sunan Gunung Djati: Sang Penata Agama di Tanah Sunda*. LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Kartodirdjo, S. (1988). *Pengantar sejarah Indonesia baru: Dari Emporium sampai Imperium (1500-1900)*. Gramedia.
- Lasmiyati. (1995). *Sunan Gunung Jati dan sistem pemerintahan Kesultanan Cirebon*. Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran.
- Masduqi, Z. (2011). *Cirebon dari kota tradisional ke kota kolonial*. Nurjati Press.
- Michrob, H. (1995). *Arsitektur kota Islam di Jawa*. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Moertono, S. (1981). *State and statecraft in old Java: A study of the later Mataram period, 16th to 19th century*. Cornell University Press.
- Musrifah. (2018). Wisata Religi Makam Gunung Jati Cirebon sebagai Budaya dan Media Spiritual. *Wahana Akademika*, 5(1), 101-110.
- Panitia Pengumpul Data Hari Jadi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. (1988). *Sejarah Hari Jadi Cirebon*. Pemda Kabupaten Cirebon.
- Reid, A. (1988). *Southeast Asia in the age of commerce, 1450-1680 (Vol. 1: The lands below the winds)*. Yale University Press.
- Reid, A. (1999). *Charting the shape of early modern Southeast Asia*. Silkworm Books.
- Rohaedi, A., dkk. (1989). *Pustaka Pararatwan I Bhumi Jawadwipa*. Yayasan Pembangunan.
- Saksono, D. (1995). *Sekaten dan tradisi Islam Jawa*. Bentang Budaya.
- Sanggupri Bochari, M., & Kuswiah, W. (2001). *Sejarah kerajaan tradisional Cirebon*. CV Suko Rejo Bersinar.
- Shiddique, S. (1977). *The sociology of Islam in Java: The Cirebon case*. National University of Singapore.
- Soenardjo, S. (1983). *Sejarah Cirebon*. Pemda Kotamadya Cirebon.
- Soenardjo, S. (1996). *Cirebon dari masa ke masa*. Pusat Studi Sunda Universitas Padjadjaran.
- Sulendraningrat, P. S. (1985). *Sejarah Cirebon dan para wali*. Keraton Kasepuhan.
- Suseno, F. M. (1994). *Etika Jawa: Sebuah analisa falsafi tentang kebijaksanaan hidup Jawa*. Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran. (1991). *Laporan penelitian sejarah Cirebon: Keraton dan lingkungan budaya*. Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran.
- Woodward, M. R. (1999). *Islam Jawa: Kesalehan normatif versus kebatinan*. LKiS.
- Yunita, S. (1990). *Ragam hias pada Masjid Agung Sang Ciptarasa Cirebon: Tinjauan bentuk dan kesinambungan* (Skripsi, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia).